

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perusahaan sektor pertambangan adalah satu dari sejumlah sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Octaviani, et, al., 2025), terutama dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak dan devisa ekspor (Irham, et, al., 2024). Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor pertambangan tetap menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2023, penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp131,2 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp127,88 triliun dan pajak sebesar Rp3,32 triliun.

Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertambangan menyumbang 13,34% dari total ekspor nasional pada tahun 2023, menjadikannya salah satu sumber utama devisa negara. Kontribusi signifikan ini mempertegas posisi strategis sektor pertambangan dalam menopang anggaran negara, baik melalui pajak maupun PNBP, sekaligus berperan dalam menjaga neraca perdagangan melalui sumbangan ekspor komoditas tambang seperti batubara, nikel, dan tembaga. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya menjadi andalan fiskal, tetapi juga memainkan peran penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara (melalui pajak dan devisa), masih banyak perusahaan tambang

yang minim melaksanakan CSR secara substantif, atau bahkan melakukan praktik penghindaran pajak. Padahal secara normatif, perusahaan yang mendapatkan manfaat besar dari negara dan sumber daya publik diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Namun demikian, sektor pertambangan juga kerap menjadi sorotan karena dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya (Ningtyas, et al., 2022). Oleh karenanya, eksistensi perusahaan pertambangan tidak hanya dinilai dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga dari tanggung jawab sosial yang mereka emban melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjawab tuntutan publik dan lingkungan (Kaligis, et al., 2025). Dalam konteks ini, penilaian terhadap kinerja CSR menjadi penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan fungsi sosialnya secara proporsional.

Di sisi lain, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi isu penting dalam dinamika keuangan perusahaan, khususnya di sektor pertambangan (Martini, & Riswandi, 2025). Penghindaran pajak dilakukan melalui strategi perencanaan pajak yang legal namun sering kali menimbulkan dilema etika dan kepatutan. Perusahaan menggunakan berbagai celah dalam regulasi perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan. Tindakan ini dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara, khususnya dalam membiayai pembangunan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan yang serius dalam aktivitas CSR juga melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk strategi ganda yang kontradiktif.

Beberapa studi telah mencoba menjelaskan hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja CSR, namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Sebagai contoh, Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa perusahaan yang menjalankan *tax avoidance* cenderung mempunyai taraf pengungkapan CSR yang lebih baik, sebagai strategi legitimasi. Sebaliknya, Sari dan Nugroho (2018) menyatakan tidak terdapat keterkaitan yang nyata antara keduanya, sehingga menegaskan bahwa CSR tidak dipergunakan sebagai alat guna menutupi *tax avoidance*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks, periode, dan karakteristik industri dapat memengaruhi dinamika hubungan tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan kajian selanjutnya dalam konteks perusahaan Indonesia, khususnya sektor pertambangan.

Perusahaan pertambangan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) diambil sebagai objek dalam riset ini dikarenakan mempunyai tingkat keterbukaan informasi yang tinggi. Dengan kewajiban laporan tahunan serta keberlanjutan (*sustainability report*), informasi mengenai CSR dan beban pajak menjadi lebih mudah diakses dan dianalisis. Selain itu, sektor ini memiliki tantangan lingkungan dan sosial yang cukup kompleks, sehingga mendorong perusahaan untuk membangun citra positif melalui CSR. Namun di saat yang sama, terdapat insentif untuk menekan beban pajak demi menjaga profitabilitas. Keseimbangan antara keduanya menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah.

Pengukuran kinerja CSR salah satunya dapat dilakukan menggunakan CSR *Disclosure Index* yang berbasis pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 4.0 (Heryanto, & Juliarto, 2017). GRI 4.0 menekankan pada relevansi dan

materialitas isu-isu keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keberlanjutannya. Maka dari itu, indeks ini dapat memberi deskripsi yang lebih komprehensif dan objektif terkait seberapa jauh perusahaan mengerjakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Penggunaan GRI 4.0 juga memungkinkan adanya perbandingan lintas perusahaan dan lintas waktu. Hal ini penting untuk mengamati tren dan pola pengungkapan CSR pada sektor pertambangan selama periode 2020 hingga 2024.

Sementara itu, penghindaran pajak bisa diproksikan melalui indikator *Effective Tax Rate* (ETR) yang merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Hanafi, 2016). ETR yang lebih rendah dari tarif pajak nominal dapat mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak (Bahri, et, al., 2024). Indikator ini telah digunakan secara luas dalam berbagai studi internasional maupun nasional. Meskipun ETR bukan satu-satunya cara untuk mengukur *tax avoidance*, namun kepraktisannya menjadikannya alat yang efektif untuk analisis empiris. Penggunaan ETR juga memungkinkan untuk melihat variasi praktik penghindaran pajak antar perusahaan dalam satu sektor industri.

Tingkat penghindaran pajak perusahaan memengaruhi sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan CSR. Melalui pendekatan tersebut, dapat memberikan pemahaman mengenai motif dan dampak dari aktivitas sosial dan fiskal perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan teori legitimasi dan teori agensi yang menjelaskan perilaku manajemen dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan.

Selain penghindaran pajak, kinerja keuangan juga menjadi determinan penting dalam pelaksanaan CSR (Rochmawati, & Kurnia, 2015). *Return on Equity* (ROE) sebagai indikator kinerja keuangan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham (Kasmir, 2014). Dalam banyak penelitian, ROE berperan positif terhadap pelaksanaan CSR, karena perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki kapasitas finansial yang lebih besar. Namun demikian, terdapat pula studi, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berbanding lurus dengan intensitas CSR, tergantung pada strategi dan nilai-nilai yang diadopsi oleh perusahaan. Penelitian Daromes, et, al., (2022) menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap praktik CSR. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana hubungan ROE dan CSR terjadi dalam konteks sektor pertambangan Indonesia.

Di sisi lain, biaya pendanaan dari bank juga dapat memengaruhi pelaksanaan CSR (Li et, al., 2018). Perusahaan yang menghadapi biaya bunga yang tinggi cenderung memiliki tekanan likuiditas, sehingga dapat mengurangi anggaran untuk aktivitas sosial. Namun, perusahaan dengan kinerja CSR yang baik bisa memperoleh insentif berupa biaya pinjaman yang lebih rendah dari institusi keuangan yang mengadopsi prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh biaya pendanaan terhadap CSR. Misalnya, penelitian Damayanti dan Priantini (2021) menyatakan bahwa biaya utang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sebaliknya, studi oleh Nuraini dan Safitri (2020)

menunjukkan bahwa perusahaan dengan biaya utang rendah cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan pentingnya analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel kontrol yang memadai. Variabel kontrol yang dapat digunakan mencakup *leverage*, likuiditas, dan belanja modal.

Leverage atau rasio utang terhadap aset menunjukkan seberapa besar perusahaan membiayai operasionalnya dengan utang (Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan dengan leverage tinggi biasanya memiliki beban bunga yang besar, yang dapat menghambat kegiatan CSR karena keterbatasan anggaran. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan justru meningkatkan CSR sebagai strategi reputasi untuk mengimbangi risiko keuangan yang tinggi. Oleh karena itu, pengaruh leverage terhadap CSR tidak dapat digeneralisasi dan perlu dianalisis secara kontekstual. *Leverage* dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel kontrol untuk mengisolasi pengaruh utama dari variabel bebas.

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi cenderung memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk mendukung program CSR. Namun, perusahaan yang terlalu konservatif dalam mengelola kas mungkin menunda atau mengurangi alokasi dana untuk tanggung jawab sosial. Maka dari itu, likuiditas menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam analisis hubungan keuangan dan CSR. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*) sebagai indikator kontrol.

Belanja modal merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya (Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan yang agresif dalam belanja modal bisa jadi lebih fokus pada ekspansi dan efisiensi internal, sehingga mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Namun, dalam jangka panjang, belanja modal juga dapat mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, misalnya melalui investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, belanja modal juga digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil hubungan antara variabel bebas dan terikat tidak bias oleh faktor investasi perusahaan.

Penelitian ini mengambil periode 2020–2024 yang mencakup masa pandemi COVID-19 dan periode pemulihan ekonomi pasca pandemi. Periode ini sangat penting karena pandemi telah mengubah banyak aspek operasional dan strategi perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak dan kegiatan sosial. Banyak perusahaan mengalami tekanan likuiditas dan penurunan laba, yang berdampak pada alokasi dana CSR dan perencanaan pajak. Oleh karena itu, analisis pada periode ini akan memberikan gambaran yang lebih aktual dan relevan mengenai dinamika perusahaan.

Salah satu alasan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konseptual dan empiris yang selama ini belum terjawab secara tuntas, terutama terkait hubungan antara penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin berupaya memanfaatkan kegiatan CSR untuk memperoleh citra positif di mata publik, padahal pada saat yang sama mereka melakukan praktik penghindaran pajak secara sistematis. Di sisi

lain, tidak sedikit pula perusahaan yang benar-benar menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan dan tidak menghindari pajak secara agresif. Oleh karena itu, memahami motif dan strategi di balik pelaksanaan CSR menjadi hal penting, khususnya dalam konteks sektor pertambangan yang kaya akan kontroversi fiskal dan sosial. Penelitian ini mengkaji interaksi antara motivasi finansial dan sosial tersebut terjadi secara simultan.

Sektor pertambangan sendiri memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor lain, seperti tingkat risiko tinggi, ketergantungan pada sumber daya alam, dan pengaruh besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal (Risal, et, al, 2013). Kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial sekaligus efisien secara fiskal agar tetap beroperasi secara berkelanjutan. Selain itu, data dari periode 2020–2024 memberikan ruang untuk melihat perubahan perilaku korporasi sebelum, selama, dan setelah krisis global akibat pandemi.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dinyatakan bahwa hubungan antara penghindaran pajak, kinerja CSR, dan kinerja keuangan perusahaan merupakan isu yang kompleks, saling memengaruhi, dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Hasil studi sebelumnya yang belum konsisten, serta minimnya penelitian yang mengintegrasikan variabel kontrol seperti leverage, likuiditas, dan belanja modal, menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

1.2.Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan tentang hubungan antara penghindaran pajak, kinerja CSR dan dampak keuangan perusahaan sektor pertambangan berdasarkan

teori maupun hasil penelitian empiris, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Kinerja CSR?
2. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja CSR?
3. Apakah Biaya Pendanaan Bank berpengaruh terhadap Kinerja CSR?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap Kinerja CSR.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kinerja CSR.
3. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Pendanaan Bank terhadap Kinerja CSR.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini relevan dalam mengembangkan teori legitimasi, di mana perusahaan berusaha memperoleh dukungan sosial melalui kegiatan CSR untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Di sisi lain, teori agensi menjelaskan bahwa manajemen perusahaan bisa saja bertindak oportunistik dalam mengelola informasi CSR dan strategi pajak untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham tertentu. Dengan menggabungkan dua perspektif teoritik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Apalagi di era

transparansi dan akuntabilitas seperti saat ini, perilaku perusahaan dalam dua ranah tersebut semakin mendapatkan perhatian dari publik, investor, dan media. Oleh karena itu, hubungan antara legitimasi sosial dan efisiensi fiskal perlu dianalisis secara empiris dalam konteks yang lebih kontemporer.

2. Kegunaan Praktis

Selain untuk menjawab kesenjangan teori dan hasil empiris yang tidak konsisten, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan otoritas fiskal di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun regulasi pajak yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan insentif non-fiskal seperti kinerja CSR perusahaan. Dengan memahami pola hubungan antara penghindaran pajak dan CSR, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendorong perilaku korporasi yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, insentif pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak CSR yang baik dan transparan. Pendekatan ini dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan.

1.4.Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang saling berkaitan untuk menjelaskan secara menyeluruh pokok permasalahan, pendekatan penelitian, serta temuan empiris yang diperoleh. Bab I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan, serta menjabarkan fenomena empiris dan celah penelitian

yang ingin ditelusuri. Pada bagian ini juga dirumuskan pertanyaan penelitian secara eksplisit dalam subbab 1.2 Rumusan Masalah, yang menjadi dasar untuk arah analisis selanjutnya. Kemudian dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian pada subbab 1.3, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Bagian ini ditutup dengan subbab 1.4 Sistematika Penulisan, yang memberikan gambaran umum mengenai struktur isi dokumen penelitian secara keseluruhan.

Selanjutnya, Bab II Telaah Pustaka, menyajikan landasan teoritis yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, serta mereview beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Dalam subbab 2.1, dijelaskan teori-teori utama seperti teori legitimasi dan teori agensi, serta hasil studi sebelumnya mengenai Kinerja CSR, penghindaran pajak, kinerja keuangan perusahaan, dan biaya pendanaan bank. Kemudian, pada subbab 2.2 Kerangka Pemikiran, diuraikan alur logika dan hubungan antar variabel yang akan diuji, disertai skema kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan. Terakhir, pada subbab 2.3 Hipotesis, disusun hipotesis-hipotesis penelitian berdasarkan teori dan hasil studi sebelumnya, yang akan diuji secara empiris pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Pada subbab 3.1, dijelaskan mengenai variabel penelitian dan definisinya, baik variabel bebas, terikat, maupun kontrol. Subbab 3.2 Populasi dan Sampel menjelaskan ruang lingkup perusahaan yang diteliti serta teknik pengambilan sampelnya, sedangkan subbab 3.3 menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder dari laporan tahunan dan laporan

keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, subbab 3.4 Metode Pengumpulan Data menjelaskan bagaimana data dikumpulkan secara sistematis. Akhirnya, subbab 3.5 Metode Analisis Data memaparkan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, termasuk penggunaan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik.

Bab IV Hasil dan Analisis, menyajikan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan. Subbab 4.1 Deskripsi Objek Penelitian memuat informasi mengenai karakteristik perusahaan sampel yang diteliti, termasuk profil umum dan data dasar keuangannya. Kemudian pada subbab 4.2 Analisis Data, ditampilkan hasil olah data statistik dan pengujian hipotesis, disertai dengan penafsiran hasil dari pengaruh antar variabel. Subbab 4.3 Interpretasi Hasil mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teori serta membandingkannya dengan hasil studi terdahulu, untuk melihat sejauh mana konsistensi dan kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang ada.

Sebagai penutup, Bab V Penutup, memuat kesimpulan dari seluruh temuan yang telah dianalisis, sebagaimana diuraikan dalam subbab 5.1. Kesimpulan disusun berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pada subbab 5.2, disampaikan saran-saran yang bersifat praktis maupun teoritis bagi manajemen perusahaan, regulator, serta peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa. Dengan sistematika penulisan yang terstruktur ini, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara logis dan memperoleh pemahaman yang utuh terhadap topik yang dikaji.